

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian teori dan analisis data lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) di Kabupaten Tuban belum berjalan secara optimal, dikarenakan :

1. Standar dan sasaran implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) termuat dalam landasan hukum serta undang - undang yang dijadikan acuan dalam pengimplementasian kebijakan, dilihat dari indikator standar sudah jelas dan ada dalam perda Kabupaten Tuban serta undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada. Namun, implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) belum sepenuhnya sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan, karena pembangunan fisik Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) belum bisa memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan regulasi. Meskipun begitu, jika dilihat dari indikator sasaran kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) ini dapat dikatakan tercapai, mulai dari mudahnya aksesibilitas baik lalu lintas maupun mobilitas masyarakat. selain itu juga sebagai pemertaan dan pergerakan ekonomi yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya harga jual tanah serta banyaknya

peluang usaha baru yang bisa menjadi penghasilan bagi masyarakat sekitar.

2. Dua sumber daya yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) yaitu sumber daya manusia dan sumber daya finansial sudah terlaksana namun tidak semua indikator dari sumber daya tersebut yang dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang cukup namun kuantitasnya masih terbilang kurang. Adapun dengan sumber daya finansial yang dirasa kurang mendukung, karena dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari pemerintah Kabupaten Tuban harus dibagi untuk pembebasan lahan sekaligus dengan pembangunan konstruksi jalan yang mengakibatkan pembangunan fisik jalan yang tidak bisa memenuhi standar regulasi yang ada.
3. Karakteristik organisasi pelaksana pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) ini tidak lepas dari struktur birokrasi, norma atau aturan, serta pola-pola hubungan yang terjalin. Meski tidak terdapat struktur birokrasi sebagai acuan tugas dan fungsi tiap organisasi, tapi para pelaksana kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) melihat pada kesesuaian dengan mekanisme dan standar yang berlaku, sehingga organisasi atau agen pelaksana dapat memahami dan mengerti terhadap tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya masing – masing baik secara individu maupun kelembangaan dengan saling berkoodinasi dan berinterkasi agar kebijakan dapat berjalan sesuai dengan yang ditentukan.

4. Komunikasi antar organisasi dapat diukur keberhasilannya melalui konsistensi atau keseragaman informasi yang diberikan serta ketepatan informasi dari para pelaksana. Namun dalam pengimplemntasian kebijakan pembangunan jalan lingkar selatan, keduanya tidak dapat berjalan dengan baik. Adanya ketidakkonsistenan atau keseragaman informasi yang diberikan pemerintah kepada warga terkait dengan penggunaan lahan untuk Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*). Selain itu, terdapat pula ketidaktepatan informasi yang terjadi antar Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban dan kontraktor pembangunan, sehingga menimbulkan masalah dengan para petani yang akses irigasinya teruruk material pembangunan.
5. Sikap pelaksana dalam implemnetasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) dapat dilihat dari indikator respon implementator terhadap kebijakan, yaitu pemahaman dari para pelaksana kebijakan yang dirasa sudah paham terkait kebijakan yang sedang dilaksanakan. Lalu tanggapan atau respon para pelaksana kebijakan yang menunjukkan bahwa tidak adanya penolakan dari para pelaksana kebijakan. dan terkait dengan intensitas tanggapan dapat diukur dengan banyaknya pegawai yang rela lembur agar proyek pembangunan segera terselesaikan karena seluruh pelaksana kebijakan mendukung program pembangunan ini dan berada dalam satu kesepahaman yakni menyukseskan implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*).

6. Tidak seluruhnya lingkungan eksternal yang terdiri dari sosial, ekonomi, dan politik mendukung adanya pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*). Lingkungan sosial yang salah satu instrumennya adalah masyarakat serta lingkungan ekonomi yang instrumennya dari taraf ekonomi masyarakat, tidak memberikan respon positif terhadap kebijakan ini, banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Sedangkan lingkungan politik yaitu berasal dari instansi pemerintah baik dari bupati dan jajarannya serta DPRD mendukung penuh pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*).

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya sebagai berikut :

1. Meskipun sasaran implementasi kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) telah tercapai, namun perlu untuk mengencangkan usaha lobi baik eksekutif maupun legislatif kepada pemerintah pusat agar pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*) dapat terselesaikan dan memenuhi standar sesuai dengan regulasi yang ada.
2. Para pelaksana baik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban serta para kontraktir hendaknya mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan dilakukan pendidikan dan pelatihan agar lebih tercipta sumber daya manusia yang lebih handal dan kompeten,

3. Dari segi kuantitas sumber daya manusia hendaknya dilakukan penambahan pegawai agar kebijakan dapat berjalan lebih optimal.
4. Perlu adanya peningkatan sumber daya finansial yang dapat menunjang keberhasilan program pembangunan dengan cara meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (*Ring Road*).
5. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi seperti ketidaktepatan serta ketidakkonsistenan hendaknya dapat diminimalisir dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke sesama instansi pelaksana.
6. Pemerintah Kabupaten Tuban perlu meningkatkan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat dan juga lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat agar masyarakat yang terimbas kebijakan lebih berdaya dari sisi ekonomi dan dapat menerima kebijakan dengan senang hati karena tidak ada yang merasa dirugikan.